



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD. Rencana Kerja PD ini berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja PD berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

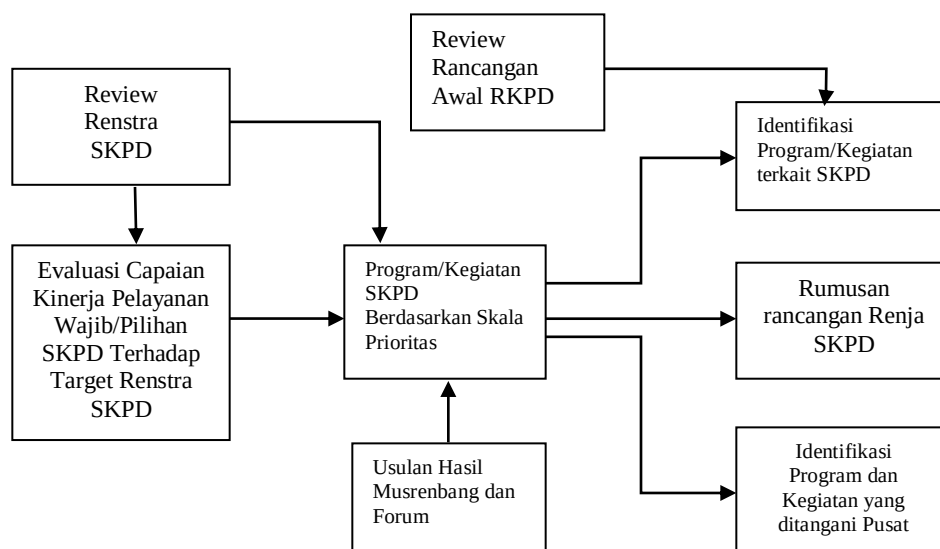
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang



dirumuskan dalam rancangan awal PD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD



Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dalam peningkatan pembangunan bidang sosial, Dinas Sosial Kota Prabumulih yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, mengupayakan peningkatan pembangunan bidang sosial secara menyeluruh dan merata kesemua elemen yang ada di Kota Prabumulih.



Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sebuah perencanaan strategis (*strategic planning*) yang sudah ditetapkan.

Penyusunan perencanaan strategi Dinas Sosial dalam rangka pemenuhan Tugas, Pokok dan Fungsi serta Koordinasi untuk melaksanakan pembangunan dibidang sosial di Pemerintahan Kota Prabumulih, oleh karena itu Dinas Sosial Kota Prabumulih berupaya dan berusaha seoptimal mungkin apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi dan memperjelas prioritas organisasi perangkat daerah serta penyusunan Rencana Kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi Dinas Sosial melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Prabumulih tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam :

1. Performance plane (penyusunan rencana kinerja)
2. Workplane and budget (penyusunan rencana kerja dan anggaran kinerja)
3. Performance agreement (menyusun penetapan kinerja)
4. Melaksanakan tugas, pokok dan fungsi kegiatan dilingkungan Dinas Sosial.
5. Penyusunan Prioritas Kegiatan Tahun Bersangkutan.
6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

1.2. LANDASAN DASAR/ HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Prabumulih tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 06 tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 06 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih;
 6. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan kota prabumulih
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. SK Kepala LAN No.239/X/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2005 Nomor 2 seri D);
 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2025 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2025 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Prabumulih tahun 2022 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Prabumulih yang telah disusun.
- b. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Prabumulih pada tahun sebelumnya.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Kota Prabumulih sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih
- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial Kota Prabumulih.
- e. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Prabumulih yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum



1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.7. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.10. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.11. Tujuan dan sasaran Renja PD

1.12. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2018-2023. Evaluasi Renja tahun 2023 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Prabumulih.

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah(DPA-OPD) T.A 2023 ditetapkan sebesar Rp. 14.615.451.278,- yang terdiri dari belanja Operasi Rp 14.569.788.278,- dan Belanja Modal sebesar Rp 45.663.000,- .Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) T.A 2023 mengalami perubahan anggaran pada OPD Dinas Sosial Kota Prabumulih (DPA.P-OPD) sehingga menjadi **Rp. 15.330.169.278,-** (*Lima belas milliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah*) dengan rincian: Belanja Operasi Rp 15.284.506.278,- dan Belanja Modal Rp 45.663.000,-

Total nilai realisasi belanja langsung Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar Rp. 14.303.395.973,- (*Empat belas milliar tiga ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah,-*) 93,30 % dari total alokasi dana sebesar **Rp. 15.330.169.278,-** (*Lima belas milliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah,-*).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Sosial Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan; Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dari yang direncanakan;;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program dan Kegiatan;
5. Kebijakan-kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut;

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: :

- a. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;



Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.418.124.778	89	3.057.929.401	100
I.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000	100	35.297.016	100
I.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	100	23.947.000	100
I.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	100	3.000.000	100
I.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	3.000.000	100	2.990.000	100
I.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	79	2.360.000	100
I.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	100	3.000.000	100
I.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.445.390.778	100	2.125.527.083	100
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.040.463	98,76	2.315.844.734	100
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.746.537	88,50	167.040.000	100
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	100	6.000.000	100
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.000.000	100	6.000.000	100
I.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	97,00	29.100.000	100
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	97,00	29.100.000	100
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-	24.400.000	0	-	0



		Undangan				
I.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.234.000	96,73	604.768.001	100
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	98,97	69.278.000	100
1.4.2		Penyediaan BahanLogistik Kantor	35.000.000	52,29	18.302.000	100
1.4.3		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.234.000	44,98	13.600.000	
1.4.4		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.766.000	98,66	4.702.000	
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	99,96	29.987.188	100
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	46,60	9.320.000	
1.4.7		Penyediaan Bahan/Material	27.500.000	82,59	22.712.000	100
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.000.000	96,97	382.992.617	100
1.4.9		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	47,50	3.800.000	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	90.000.000	94,29	84.856.953	100
I.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	99,84	39.937.000	100
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	456.000.000	90,63	413.280.000	
1.5.2		Pengadaan Mebel	35.250.000	98,10	34.582.000	
1.5.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.400.000	100	37.400.0000	
1.5.4		Pengadan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.050.000	98,28	19.706.000	
I.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	33,33	2.000.000	
1.6.1		Penyediaan JasaSurat Menyurat	6.000.000	33,33	2.000.000	
I.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.000.000	92,17	224.900.301	100
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.000.000	68,60	283.310.720	100
1.7.2		Belanja ASURANSI Barang Milik Daerah	12.000.000	72,09	8.651.200	



1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	96,50	24.125.000	
1.7.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	99,67	19.933.000	
II		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.872.173.000	95,05	9.383.123.209	
II.1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.872.173.000	95,05	9.383.123.209	100
II.1.2		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.866.526.000	97	9.383.694.884	100
II.1.3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	69.000.000	93	63.423.559	100
II.1.4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0%	150.000.000	0
II.1.5		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	69.000.000	90%	63.423.559	100
III		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.244.389.000	93	1.162.474.394	93
III.1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	498.875.000	95	473.382.834	100
III.1.1		Penyediaan Alat Bantu	49.990.000	97	44.920.000	100
III.1.2		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	179.075.000	99	178.171.000	100
III.1.3		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	218.800.000	90	196.221.847	100
III.1.4		Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	99	49.720.000	100
III.2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	745.514.000	92	689.091.560	83
III.1.5		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	30.000.000	12	3.590.000	50
III.1.6		Penyediaan Pemakanan	565.514.000	97	548.272.958	100



III.2.1		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150.000.000	91	137.228.602	100
IV		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	402.930.000	95,75	385.803.230	100
IV.1		Pengelolaan Data Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	402.930.000	95,75	385.803.230	100
IV.1.1		Pendataan Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	40.000.000	77,98	31.190.000	100
IV.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	192.930.000	97.83	188.743.500	100
IV.1.3		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150.000.000	97,25	145.869.730	100
IV.1.4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20.000.000	100	20.000.000	100
V		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	618.630.000	40,63	251.370.000	33,33
V.1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	365.000.000	2,19	8.000.000	20
V.1.1		Penyediaan Makanan	175.000.000	0	0	0
V.1.2		PenyediaanSandang	165.000.000	0	0	0
V.1.3		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000	80	8.000.000	100
V.1.4		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.000.000	0	0	0
V.1.5		Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	0	0	0
V.2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	253.630.000	95,95	243.370.000	100
V.1.1		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan TarunaSiaga Bencana	253.630.000	95,95	243.370.000	100



VI		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	137.950.000	57,33	79,093.450	75
VI.1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	137.950.000	57,33	79.093.450	75
VI.1.1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.960.000	96,96	25.170.950	100
VI.1.2		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	111.990.000	48,15	53.922.500	50



Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DINSOS Kota Prabumulih Tahun 2023 dan Realisasi Renstra

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Program (<i>Outcomes</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan		Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023			
				Target Akhir Renstra (2026)	Tahun 2023			Tahun 2024
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target
(1)	(2)	(6)		(3)	(4)	(5)		
	Uerusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	Bidang Urusan Bidang Sosial							
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD		32.072.000	30.105.000	93.86		



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD		6.980.000	6.980.000	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD		4.410.000	4.410.000	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		2.536.949.044	2.178.316.970	85.86		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Keuangan)	Tersedianya Jasa ADM Keuangan		97.690.000	97.690.000	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran		7.469.000	7.153.000	95.76		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		7.939.000	7.939.000	100		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga		23.486.000	23.350.000	99.42		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah							



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya AC dan Mobiler		89.493.000	84.200.000	94.08		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Dan Minum Kantor		31.996.000	31.996.000	100.00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan		27.183.600	24.344.000	89.55		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		16.999.000	14.650.000	86.18		
	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor		33.650.000	33.650.000	100.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah		279.507.000	271.809.000	97.24		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Pelaksanaan Peralatan SPBE		150.000.000	123.159.000	82.10		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		9.000.000	8.960.000	99.55		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediany Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		295.501.000	242.764.450	82.15		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Hardware, Software dan Jaringan		20.300.000	20.248.000	99.74		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum		50.001.000	50.001.000	100.00		
II	Program Pemberdayaan Sosial							
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Adanya 96 Orang PSM dan 6 Orang TKSK yang Cakap dan Terampil Dalam Bertugas		295.260.000	268.418.000	90.90		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten / Kota		12.213.041.000	11.812.153.813	96.71		
III	Program Disabilitas Sosial							
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia , Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar							



	Panti Sosial							
	Penyediaan Sandang	Pelaksanaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)		213.595.000	203.555.000	95.29		
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu (Kursi Roda, Tongkat Ketiak, Kaki Palsu dan Hearing AIDS		45.885.000	41.973.000	91.47		
	Pemberiaan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanganan Masalah Anak Jalanan, Pengemis, Tunasusila dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		211.698.000	69.536.000	32.84		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terbinanya Masyarakat Program Keluarga Harapan		243.800.000	239.000.000	98.03		
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS NAFZA diluar Panti Sosial							
1	Penyediaan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Pembina Panti Asuhan		28.142.400	27.364.400	97.23		
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							



10	Pengelola Data Farkir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							
	Pendataan Farkir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Tahun 2021		5.490.000	5.482.000	99.85		
V	Program Penanganan Bencana							
11	Penyelenngaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Adanya 40 Orang Tagana (Taruna Siaga Bencana) Sigap dan Terampil		139.800.000	136.800.000	97.85		
VI	Program Pengolahan Taman Makam Pahlawan							
12	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota							
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan		23.920.000	23.920.000	100		



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020			Tahun 2021
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	Bidang Urusan Dinas Sosial							
(1)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah						
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos Lainnya)	Lembar	materai 6000 1000 lembar,materai 3000 900 lembar	materai 6000 1000 lembar,materai 3000 900 lembar	materai 6000 1000 lembar,materai 3000 900 lembar	100	materai 6000 1000 lembar,materai 3000 900 lembar
2	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	STNK	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	100	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit
3	Tersedianya Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Orang	30	6	6	100	6
4	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor untuk Mendukung Tugas-tugas	Item	557	25	25	100	25
5	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	1400 Lembar 47 Buku	1400 Lembar 47 Buku	1400 Lembar 47 Buku	100	1400 Lembar 47 Buku
6	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah	Exemplar	100	20	20	100	20
7	Tersedianya Penyediaan Makan Minum	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Orang	200	40	40	100	40
8	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	75	15	15	100	15
9	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	75	15	15	100	15



	dalam Daerah							
(2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	5	1	1	100	1
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	Mobil 30 unit, Motor 20 Unit	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	100	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Hardwer/Software/Jaringan Komputer	Jenis	8	8	8	100	8
(3)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparaturn yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD						
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Olahraga	Setel	175	35	0	0	35
(4)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang baik dan tepat waktu						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP DINSOS	Dokumen	5	1	1	100	1
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester yang Tepat	Dokumen	5	1	1	100	1
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tepat	Dokumen	5	1	1	100	1
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA	Dokumen	5	1	1	100	1
5	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	Dokumen	5	1	1	100	1
6	Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Tersusunnya Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen	5	1	1	100	1
7	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Dokumen	5	1	1	100	1
8	Penyusunan LPPD	Tersusunnya LPPD	Dokumen	5	1	1	100	1



9	Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD	Tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD	Dokumen	5	1	1	100	1
10	Penyusunan SIPPD,SIMPDP dan SIRUP	Tersusunnya SIPPD,SIMPDP dan SIRUP	Dokumen	15	3	3	100	3
(5)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang tertangani						
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Tersedianya bantuan operasional anggota PSM dan TKSK serta seleksi PSM Kota Prabumulih	Orang	530	106	106	100	106
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS Lainnya	Tersedianya data Para Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dok	5	1	0	0	1
3	Penanganan Masalah anak jalanan,gelandangan,pengemis,tuna susila dan Orang dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ)	Tertanganinya masalah anak jalanan,gelandangan, pengemis,tuna susila dan orang dengan gangguan kejiwaan	TW		4	4	100	4
(6)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penduduk miskin						
1	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Terlaksananya Pembinaan Tagana (Bantuan Operasional)	Orang	200	40	40	100	40
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	Masyarakat Program Keluarga Harapan		10	2	2	100	2
(7)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang terlayani						
1	Penyebaran Informasi Pelayanan Sosial Melalui Pameran dan Kendaraan Hias	Terlaksananya Penyebaran Informasi Pelayanan Sosial melalui pameran,kendaraan hias dan senam bersama	Kegiatan	10	2	2	100	2
2	Bakti Lanjut Usia	Terlaksananya hari lanjut usia	Orang	19	19	19	100	20



3	Peningkatan Kualitas SDM LVRI, Warakawuri, Piveri dan Perip	Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM LVRI, Uang Tali Asih, Warakauri, Piveri dan Perip	Orang	805	161	161	100	161
4	Bakti Kepahlawanan	Terlaksananya Program Bakti Kepahlawanan	Keg	5	1	1	100	1
(8)	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapat penanganan						
1	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma)	Tersedianya Kursi Roda, Haering, Tongkat Ketiak, Kaki Palsu	Buah	50	10	10	100	10
(9)	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang diberdayakan						
1	Pembinaan Panti Asuhan	Terlaksananya Pembinaan Panti asuhan	Panti	20	4	4	100	4
10	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio pemakaman umum terhadap satuan penduduk						
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan	Orang	10	2	2	100	4
2	Pemeliharaan dan Perawatan Tempat Pemakaman Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Areal Pemakaman Umum	TPU	73	73	73	100	73
11	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan	Persentase petugas sosial dan keagamaan yang terlayani						
1	Peningkatan Kesejahteraan Rumah Ibadah dan Pembantu Penghulu	Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan penjaga masjid dan pembantu dan penghulu	Orang	Penjaga Masjid 180 Org & Penjaga Tmp Ibadah non Muslim 16 Org	Penjaga Masjid 180 Org & Penjaga Tmp Ibadah non Muslim 16 Org	Penjaga Masjid 180 Org & Penjaga Tmp Ibadah non Muslim 16 Org	100	Penjaga Masjid 180 Org & Penjaga Tmp Ibadah non Muslim 16 Org



2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik TK/TPA	Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK/TPA	Orang	2725	545 org	545 org	100	545 org
3	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Tradisional/Non TPA dan Petugas Memandikan dan Mengkafani Jenazah	Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan guru ngaji tradisional/non TPA dan petugas memandikan jenazah dan mengkafani jenazah	Orang	2395 guru ngaji 1890 petugas memandikan dan mengkafani jenazah	479 guru ngaji 387 petugas memandikan dan mengkafani jenazah	479 guru ngaji 387 petugas memandikan dan mengkafani jenazah	100	479 guru ngaji 387 petugas memandikan dan mengkafani jenazah
4	Pembinaan Majelis Taklim	Terlaksananya Pembinaan majlis taklim	orang	20	9000	9000	100	9000
5	Lomba Pembacaan Tahlil dan Barzanji Rumah Pintar	Terlaksananya Lomba Pembacaan Tahlil dan Berzanji Rumah Pintar	Peserta	5000	1000	0	0	1000
6	Pelatihan Memandikan Jenazah Majelis Taklim	Terlaksananya Pelatihan memandikan dan mengkafani jenazah majelis taklim	Peserta	1000	200	0	0	200
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keagamaan	Tersedianya Prasarana Kegiatan Keagamaan	Unit	45000	9000	0	0	9200



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Prabumulih

Dinas Sosial yang membidangi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan di Kota Prabumulih yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD 2018-2023 Kota Prabumulih dapat terlaksana sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Prabumulih dapat di uraikan pada Tabel 2.3 dibawah ini :



**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Prabumulih**

NO	Indikator IKU, SPM,IKK	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Dinas Sosial				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	
2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	100%	100%	100%	100%	80%	85%	90%	95%	



5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100%	100%	100%	100%	90%	95%	97%	100%	
6.	Persentase Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



2.2.1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Di Kota Prabumulih, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Sosial dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta. Sesuai dengan misi kedua Walikota Prabumulih untuk Peningkatan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas, berprestasi dan religius pada setiap lini kehidupan.

2.2.2. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial

Di Kota Prabumulih Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial masih sangat minim, hanya terdapat 4 panti sosial yang telah terdaftar di Dinas Sosial Kota Prabumulih yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota Prabumulih

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Prabumulih

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan Masyarakat

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah sosial masih tergantung dari bantuan, banyaknya masyarakat penyandang kesejahteraan sosial belum dapat tertangani secara maksimal dikarenakan mobilitasi penduduk dari kota lain misalnya seperti gelandangan, Orang dengan Gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya. Sedangkan data bantuan seperti masih tergantung dari pusat. Dalam menangani urusan sosial terutama pada penyandang kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sector. Adanya pendataan PMKS dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS



1. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Prabumulih selama tahun 2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kota Prabumulih baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang;
- 2) Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas;
- 3) Tidak/belum tersedianya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai keahlian di bidang ketugasan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya;
- c. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) segera dilakukan, diharapkan akhir bulan Desember tahun berjalan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa usulan program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat di lakukan melalui musrenbang kabupaten/Kota. Setelah dengan berbagai survey ke lapangan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat di setuju karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Adapun usulan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini :



USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KOTA PRABUMULIH

Nama SKPD : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)
1	DPRD Kota Prabumulih merekomendasikan kepada pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini Dinas Sosial untuk menganggarkan dana sharing dari APBD Kota Prabumulih dalam rangka menunjang program kegiatan bantuan pangan Non Tunai(BPNT) mengingat Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam hal pelaporan bantuan pangan Non Tunai (BPNT).	Prabumulih	kegiatan Penyediaan Sandang (BPNT) dalam rangka menunjang kegiatan bantuan pangan Non Tunai (BPNT).	1 keg	Rekomendasi DPRD Kota Prabumulih
2	DPRD Kota Prabumulih merekomendasikan kepada Dinas Sosial dan dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak statistik sehingga tidak ada perbedaan data mengenai data kemiskinan dikota prabumulih	Prabumulih	melakukan koordinasi dengan pihak statistik	1 Tahun	Rekomendasi DPRD Kota Prabumulih



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
- b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
- c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Prabumulih

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai pernyataan untuk mendukung Rencana Strategis Pemerintah Kota Prabumulih, maka pengertian tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu,dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun kedepan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi dinas sosial kota Prabumulih atau kelompok sasaran yang dilayani

TUJUAN.

- 1. Terwujudnya Masyarakat Prabumulih yang sejahterah
- 2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Prabumulih

SASARAN.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis bidang sosial tahun 2020-2024 tersebut diatas maka ditetapkan program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Bantuan Sosial
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Prabumulih adalah sebagai berikut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1.	Terwujudnya Masyarakat Prabumulih yang sejahterah	Meningkatnya Kualitas Bantuan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial
2.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Kota Prabumulih	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi LAKIP Dinas Sosial



--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD , Dinas Sosial telah merencanakan 6 program dan 14 Kegiatan pada tahun 2025

Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Prabumulih disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2025 serta sumber dana kegiatan.

Adapun secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, untuk tahun 2025 adalah 6 program dan 14 kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif
4. Sumber dana yang dibutuhkan.

Uraian Garis besar mengenai Rakapitulasi Program dan Kegiatan.

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan usulan Dinas Sosial terdiri dari **6 Program** dan **14 Kegiatan**. Untuk tahun **2025** dengan Pagu Indikatif sebesar **Rp. 17.344.015.750,- (Tujuh Belas Miliyar tiga ratus empat puluh empat juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah,-)** Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi Program dan Kegiatan yang di kelompokkan berdasarkan 4 (EMPAT) sasaran RPJMD Dinas Sosial yakni :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial



4. Optimalisasi pelayanan masyarakat penyandang disabilitas dan kurang mampu

Berikut Tabel Rumusan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 :

BAB IV
RENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2025

KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
					Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dok	10.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	10.000.000
			Penyusunan DokuMen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja,LPPD,Perjanjian Kinerja ,SPM,Rencana Aksi SKPD	5 dok	52.500.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan SIPD ,SIMPPD,SIRUP	3 dok	15.000.000



			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Dok	7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.496.219.620	
		Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa ADM Keuangan	8 Orang	45.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	24.504.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	4 TW	14.195.040	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olah Raga, Sepatu, Topi	50 Stel	33.670.000	
	Administrasi Umum PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	90.034.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	25 Item	37.386.000	
		Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan	1400 Lembar 47Buku	24.933.400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Exsemplar	20.000.000	
		Penyediaan Bahan/Meterial	Tersedianya Bahan/Meterial Kantor	1 Tahun	35.443.040	
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi Luar dan Dalam SKPD	1 Tahun	400.000.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Tahun	60.141.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Penyediaan Meja dan Kursi,Lemari Arsip Kantor	20 Meja dan 20 Kursi	250.000.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional Rehabilitasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1 Bh	350.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Laptop,PC dan Printer Kantor	Laptop 5 bh,PC 5 bh Printer 5 Bh	150.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Alat Pendingin AC Kantor	6 buah	40.000.000	



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	materai 10000,1000 lembar	10.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil 6 unit, Motor 4 Unit	274.993.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	10 Unit	15.020.000
2	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum	75 Orang	315.100.000,-
				Kesejahteraan Penjaga Masjid dan Penjaga Tempat Ibadah Non Muslim	214 Orang	1.115.170.000,-
				Kesejahteraan Tenaga Pendidik TK/TPA	560 Orang	2.594.155.000,-
				Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Tradisional / Non TPA dan petugas Memandikan dan Mengkafani Jenazah	991 Orang	4.408.644.000,-
				Kegiatan Majelis Taklim	9000 kelompok	188.460.000,-
				Pembinaan Kelompok SDM LVRI, Warakawuri,Piveri dan Perip	161 orang	739.233.000,-
				Penyebaran Informasi Pelayanan Sosial Melalui Pameran dan Kendaraan Hias	2 x	36.951.500,-
				Pemeliharaan UPTD Pemakaman	1 keg	140.286.500,-
3	Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tetanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan,Gelandangan,Pen gemis,Tuna Susila dan Orang dengan gangguan Kejiwaan (Orgil)	1 Tahun	82.623.000
			Penyediaan Sandang	Pelaksanaan BPNT	1 Keg	250.000.000
			Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Kursi Roda, Tongkat Ketiak, Tonkat Tuna Netra	22 Buah	51.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PKH	1 Keg	260.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50 Orang	179.075.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terlaksananya Pembinaan Panti Asuhan	4 Panti	50.000.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Verifikasi Data Terpadu Kesejahetraan Sosial	4000 KK	95.000.000



		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedinya Data PMKS	1 Dok	30.000.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Data PMKS yang	1 Dok	50.000.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	UEP	100 UEP	200.000.000
5	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40 Orang Tagana yang sigap dan terampil	40 Orang	230.898.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	2 Orang	65.000.000
Jumlah						18.685.356.000



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Kota Prabumulih selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2022 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan persyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan



kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Prabumulih, Maret 2021

Kepala Dinas Sosial
Kota Prabumulih

Drs. A. HERYANTO, MM
NIP. 119660919 199312 1 001

